

## ABSTRAK

Dalam kegiatan bisnis, praktek pembuatan suatu perusahaan sebagai *special purpose vehicle* (SPV) menjadi hal yang lazim untuk memenuhi keinginan dari pendiri dalam melaksanakan suatu transaksi atau tujuan khusus tertentu. Pada perkembangannya, praktek keberadaan suatu SPV telah mendapatkan pengakuan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak yang menjadikan SPV sebagai suatu objek pajak. Namun, apabila melihat dalam praktek secara global, pendirian suatu perusahaan sebagai SPV telah berkembang lebih pesat dan dikenal lebih luas di Belanda dengan menggunakan istilah *Mailbox Company* yang menitikberatkan pada ketiadaan karyawan serta ketiadaan kegiatan bisnis yang nyata sebagai karakter utamanya. Pendirian suatu *Mailbox Company* memiliki tujuan utama yaitu untuk penghindaran pajak. Beranjak dari keberadaan suatu *Mailbox Company* tersebut, maka diperlukan kejelasan mengenai kemungkinan *Mailbox Company* untuk dapat didirikan sebagai suatu SPV di Indonesia sesuai dengan hukum perseroan di Indonesia. Oleh karenanya, suatu SPV yang berdiri di Indonesia memerlukan kajian lebih lanjut mengenai proses pendiriannya dalam perspektif hukum perseroan di Indonesia. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan, maka penelitian ini menjawab dua isu, yaitu (1) karakter dari suatu *special purpose vehicle* dalam hukum perseroan di Indonesia; dan (2) tanggung jawab *special purpose vehicle* terhadap pihak ketiga di Indonesia.

Kata kunci: *Special Purpose Vehicle*; *Mailbox Company*; dan tanggung jawab perusahaan

**ABSTRACT**

*In business activity, the practice of making a company as a special purpose vehicle (SPV) becomes prevalent to meet the wishes of the founder in executing a transaction or certain purpose. In its development, the practice of the presence of an SPV has gained recognition in Indonesia through the Ministry of Finance Regulation (PMK) Number 127 / PMK.010 / 2016 on Tax Forgiveness that makes SPV as an object of taxation. However, when viewed in the global practice, the establishment of a company as an SPV has grown more rapidly and more widely known in the Netherlands by using the term Mailbox Company that focuses on employee absence and the absence of real business activities as its main character. The establishment of a Mailbox Company has a primary objective for tax avoidance. About the existence of Mailbox Company, it is necessary to have a clarity regarding the possibility Mailbox Company to be established as an SPV in Indonesia in accordance with the company law in Indonesia. Therefore, an SPV which established in Indonesia requires further study regarding the establishment process in the perspective of company law in Indonesia. Based the explanation before, this research is answer two issues, namely (1) the character of a special purpose vehicle under company law in Indonesia; and (2) the liability of a special purpose vehicle to a third party in Indonesia.*

*Keywords: Special Purpose Vehicle; Mailbox Company; and Company Responsibility.*